

Collaborative Governance Dalam Menanggulangi Banjir di Kota Sungai Penuh

Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh

Herman ^{1*}, Andri Kurniawan ², Demi Rezki ³

E-mail: herman@soc.uir.ac.id¹, andriau@soc.uir.ac.id², demirezki@student.uir.ac.id³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

*corresponding author

Dikirimkan: 01-03-2023; Diterima: 10-03-2023; Diterbitkan: 16-03-2023

DOI: <https://doi.org/10.30996/jpap.v9i1.8325>

Abstract

Sungai Penuh City consists of several sub-districts that are prone to flooding every year, namely Tanah Kampung District, Hamparan Rawang District, and Kota Baru District. Therefore, the Regional Disaster Management Agency (BPBD) for the City of Sungai Penuh is trying to deal with the flood. The purpose of this study is to analyze and explain how collaborative governance is in tackling flooding in the City of Sungai Penuh. The type of research used is qualitative research with descriptive methods by prioritizing research aids, namely observation, interviews and documentation. Informants in this study are stakeholders who are directly involved in tackling floods in these 3 sub-districts consisting of the Chairperson of the Regional Disaster Management Agency for the City of Sungai Penuh, Head of the Public Works and Spatial Planning Office (PUPR) for the City of Sungai Penuh, Head of the Housing and Settlements Service. Sungai Penuh City and Communities affected by flooding. This study uses collaborative governance theory to see the extent to which the achievements and weaknesses of flood control have been achieved. The results of this study have not fully gone well due to the fact that maximum collaboration has not been created between related agencies appointed by the Mayor of Sungai Penuh City in flood prevention. In the future, it is hoped that the BPBD of Sungai Full City can cooperate with other agencies in dealing with floods. In addition, the BPBD of Sungai Penuh City must continue to provide outreach and simulations, especially during the rainy season so that the people of Sungai Penuh City can prepare themselves from an early age.

Keywords: *Collaborative Governance, Flood, City of Sungai Penuh*

Abstrak

Kota Sungai Penuh terdiri dari beberapa Kecamatan yang terkena langganan banjir pada setiap tahun yaitu Kecamatan Tanah Kampung, Kecamatan Hamparan Rawang, dan Kecamatan Kota Baru. Oleh sebab itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sungai Penuh berupaya dalam rangka untuk menanggulangi banjir tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana *collaborasi governance* dalam menanggulangi banjir di Kota Sungai Penuh. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan memprioritaskan alat bantu penelitian yaitu obeservasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini merupakan stakeholders yang terlibat langsung dalam menanggulangi banjir di 3 kecamatan ini yang terdiri dari Ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Sungai Penuh, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Sungai Penuh serta Masyarakat yang terkena banjir. Penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* untuk melihat sejauh mana ketercapaian dan kelemahan dari penanggulangan banjir. Hasil dalam penelitian ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan belum terciptanya kolaborasi yang maksimal antara instansi yang terkait yang ditunjuk oleh Wali Kota Sungai Penuh dalam penanggulangan banjir.

Kedepan diharapkan BPBD Kota Sungai Penuh dapat bekerjasama dengan instansi lain dalam penanggulangan banjir. Selain itu BPBD Kota Sungai Penuh mesti terus memberikan sosialisasi dan simulasi lebih-lebih pada musim penghujan agar masyarakat Kota Sungai Penuh dapat mempersiapkan diri sejak dini.

Keywords: *Collaborative Governance, Banjir, Kota Sungai Penuh*

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan daerah tropis yang rawan terhadap berbagai kejadian alam atau bencana (Arifin, 2016) seperti banjir, gunung meletus, gempa bumi, dan lain sebagainya. Dampak utama dari bencana seringkali berakibat kepada kematian, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan kerugian non-materi dan psikologis (Setyowati, 2019). Salah satu bencana yang acap kali melanda negara Indonesia adalah bencana banjir (Romadhan et al., 2023), yang mana banjir ini merupakan bencana alam yang terjadi di kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai (Musfida et al., 2021). Secara sederhana, banjir diartikan sebagai hadirnya air ke suatu kawasan luas sehingga menutupi permukaan bumi kawasan tersebut (Muhammad & Aziz, 2020). Banjir menyebabkan kerusakan serta mengganggu kegiatan perekonomian serta aktifitas masyarakat (Faiza et al., 2022). Bencana banjir ini menempati urutan pertama didunia yaitu mencapai 55%, dan di Indonesia mencapai 38% dari total keseluruhan bencana (Rosida & Adi, 2017). Banyak kerugian yang muncul diakibatkan oleh banjir, baik dari segi materil (harta benda) maupun dari segi moril (kejiwaan) (Romadhan et al., 2023), oleh sebab itu maka pemerintah dalam hal ini membuat rencana dan program untuk pencegahan bencana melalui mitigasi bencana baik pra bencana, maupun pasca bencana (Arfani, 2022).

Kota sungai penuh merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi. Kota Sungai Penuh mempunyai luas daerah sebesar 39.150 Ha dengan jumlah penduduk 88.918 jiwa terdiri dari 8 Kecamatan dengan jumlah 65 desa dan 4 kelurahan (Mizwar Zuherna, Wardi, 2021). Kota Sungai Penuh setiap tahunnya merupakan daerah langganan banjir, setiap musim hujan dan dan air sungai meluap maka Kota Sungai Penuh selalu terjadi bencana banjir (Mandasari, 2020). Dari 8 Kecamatan yang ada di Kota Sungai Penuh terdapat 3 kecamatan yang menjadi langganan banjir setiap tahunnya yaitu Kecamatan Tanah Kampung, Kecamatan Hampan Rawang dan Kecamatan Kota Baru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Data Kecamatan yang Terkena Banjir

No	Kecamatan	Keterangan
1	Tanah Kampung	Terkena Banjir
2	Kumun Debai	Tidak Terkena Banjir
3	Sungai Penuh	Tidak Terkena Banjir
4	Pondok Tinggi	Tidak Terkena Banjir
5	Sungai Bungkal	Tidak Terkena Banjir
6	Hampanan Rawang	Terkena Banjir
7	Pesisir Bukit	Tidak Terkena Banjir
8	Koto Baru	Terkena Banjir

Sumber: BPBD Kota Sungai Penuh 2022.

Seperti yang diketahui bahwa Kota Sungai Penuh langganan banjir terutama untuk 3 Kecamatan diatas. Total dari ke 3 Kecamatan tersebut terdapat beberapa desa, Kecamatan Tanah Kampung terdiri dari 14 Desa, Kecamatan Hampanan Rawang terdiri dari 13 Desa, dan Kecamatan Koto Baru terdiri dari 6 Desa. Berdasarkan data dari BPBD Kota Sungai Penuh terdapat beberapa Desa yang terdampak banjir yaitu Kecamatan Tanah Kampung sebanyak 3 Desa, Kecamatan Koto Baru sebanyak 5 desa, Kecamatan Hampanan Rawang sebanyak 13 desa, dan Kecamatan Hampanan Rawang ini merupakan Kecamatan yang terparah terdampak banjir. Dikutip dari metrojambi.com pada tanggal 25 Februari 2023, terdapat 9.628 jiwa yang terdampak banjir dimana bencana banjir di Kota Sungai Penuh ini disebabkan oleh meluapnya dua sungai yaitu Sungai Batang Merao dan Sungai Batang Sangkir yang disebabkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi. Lebih lanjut, berdasarkan catatan dari BPBB Kota Sungai Penuh sudah empat hari banjir merendam daerah tersebut (metrojambi.com. 2023).

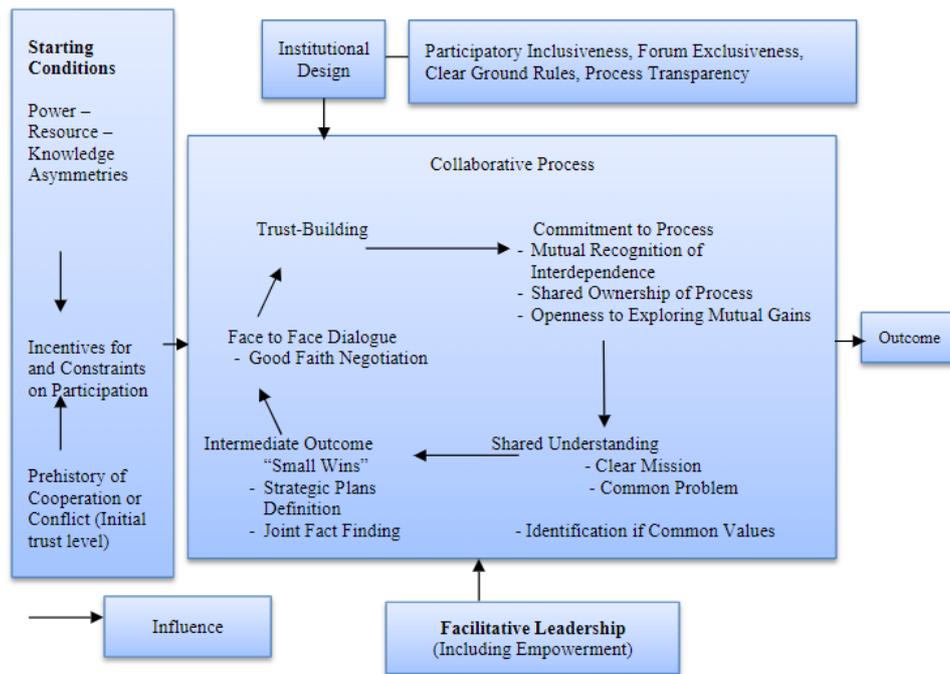
Penanganan banjir di Kota Sungai Penuh dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Kodam Kota Sungai Penuh, dan unsur masyarakat lainnya. Salah satu instansi terdepan dalam penanganan banjir di Kota Sungai Penuh ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau disingkat dengan BPBD yang dibentuk pada tahun 2010 bedasarkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah.

Begitu banyak penelitian yang mengkaji mengenai aspek *collaborative governance* dalam penanganana banjir yang salah satunya adalah dalam penanganan banjir di Jakarta dan Semarang yang melibatkan partisipasi perusahaan yang berkontribusi secara penuh untuk mengurangi resiko banjir (Neise & Diez, 2018). Kemudian penelitian yang mengkaji mengenai penanganan banjir di Kota Medan dimana pada hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa penanganan banjir meski memprioritaskan aspek *governance* dan *distributive accountability*, dimana hasil akhir dari *collaborative* lebih ditekankan pada aktor akademisi untuk berpartispasi

agar berguna dalam fase mitigasi dan resiliensi (Hariyoko, 2022; Sihaloho, 2022). Kemudian penelitian yang mengkaji mengenai *collaborative governance* dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Kepulauan Sula dimana kolaborasi antara aktor belum berjalan baik yaitu antara pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan banjir dan akademisi. Sedangkan kendala dalam penelitian tersebut adalah kurangnya sumber daya, dari anggaran dan peralatan (Umabahi et al., 2022). Penelitian selanjutnya adalah *collaborative governance* penanganan banjir di Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara dimana BPBD Kabupaten Bekasi belum maksimal dalam memegang kendali baik dari kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan serta proses kolaborasi terutama kepada pihak swasta dan masyarakat (Setiawan et al., 2021).

Selain penelitian yang bertemakan banjir, penulis juga menambahkan penelitian yang bertemakan tentang bencana diantaranya adalah Penanggulangan Pra Bencana Alam Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan dala Perspektif *Collaborative Governance*, hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa upaya collaborative yang dilakukan sangat membantu dalam upaya pra bencana alam tsunami dengan mempersiapkan anggaran, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, upaya persiapan dan mitigasi bencana (Machruf et al., 2020). Penelitian dengan tema bencana selanjutnya adalah *Collaborative Governance* pada Revitalisasi Sungai Sekanak di Kota Palembang, hasil penelitian menyatakan bahwa pemerintah Kota Palembang tidak menerapkan collaborative dalam revitalisasi Sungai Sekanak di Kota Palembang. Oleh sebab itu pemerintah Kota Palembang harus membuka ruang partisipasi seluas-luasnya terhadap masyarakat dalam rangka revitalisasi Sungai Sekanak Kota Palembang (Qur, 2021). Penelitian dengan judul *collaborative governance* dalam penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan collaborative belum terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya kepercayaan antara para pemangku kepentingan serta kurangnya sumber daya, dan kurangnya kesadaran dalam mengatasi banjir rob (Mutiarawatai & Sudarmo, 2021).

Melihat dari berbagai literatur diatas maka Pemerintah Kota Sungai Penuh perlu melakukan *collaborative governance* agar penanganan banjir membutuhkan banyak pihak terutama keterlibatan masyarakat serta instansi terkait dalam penanganan banjir di Kota Sungai Penuh. Oleh sebab itu, untuk menjawab penelitian ini penulis menggunakan teori yang digunakan oleh Ansell & Gash yang terdiri dari kondisi awal, desain institusional, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi (Al Hafis et al., 2021). Untk lebih jelasnya dapat dilihat melalui gambar berikut:



Gambar 1. Model Collaborative Governance (Sumber: Ansell & Gash 2008)

Gambar diatas menjelaskan bahwa *collaborative governance* terdiri dari empat tahapan yang terdiri dari kondisi awal, desain institusional, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi. Kondisi awal merupakan penjelasan mengenai keadaan awal yang ada di dalam sebuah organisasi atau institusi, baik dari manajemen, sumber daya, serta kapabilitas dari organisai tersebut. Disisi lain, kondisi awal juga menceritakan secara terperinci mengenai keadaan atau gambaran dari suatu institusi, gambaran ini diberikan untuk memberikan perbandingan antara sebelum dan sesudah adanya kolaboratif tersebut (Tando et al., 2019). Desain institusional atau kelembagaan yang ada pada saat pelaksanaanya dinilai banyak menemui kendala-kendala serta kurang bekerja secara optimal. Desain Institusi merupakan faktor yang paling menentukan dalam suatu kolaborasi pada penanggulangan bencana karena dapat mengatur tentang proses kolaborasi, kedudukan serta tugas, fungsi dan tanggung jawab oleh lembaga-lembaga yang terlibat (Zubaidi, 2018). Desain institusi atau kelembagaan merujuk pada aturan dasar dalam melakukan kolaborasi, hal ini menjadi sangat penting karena menjadi sebuah kekuasaan secara prosedur dalam proses berkolaborasi tersebut (Astuti et al., 2020). Kepemimpinan fasilitatif juga menjadi salah satu aspek penting dalam kolaborasi (Machruf et al., 2020), dimana kepemimpinan merupakan bagian dari kapasitas aksi bersama dalam praktek *collaborative governance* (Dewi, 2019). Dan yang terakhir adalah proses kolaborasi dimana proses kolaborasi ini merupakan sesuatu yang bersifat siklus yang berkaitan pada komunikasi, kepercayaan, komitmen, pemahaman dan hasil. Maka dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi merupakan suatu interaksi yang berulang-ulang diantar stakeholders yang terkait dengan keterlibatan dalam suatu keputusan (Ipan et al., 2021).

Terdapat beberapa penelitian yang mengangkat tema mengenai penanganan banjir di Kota Sungai Penuh, namun belum ditemukan penelitian yang mengangkat tema dengan teori *collaborative governance*. Penelitian yang dilakukan oleh Yetty dkk dengan judul Pemetaan Wilayah Bahaya Banjir di Kota Sungai Penuh, hasil temuan yang dilakukan hanya memetakan wilayah mana yang terdampak banjir dan wilayah yang tidak terdampak banjir (Yetty et al., 2018). Kemudian penelitian oleh Mandasari dengan judul Penanggulangan Bencana Banjir di Sungai Batang Merao Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019, dalam penelitian ini penanggulangan banjir dilakukan dengan cara pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi (Mandasari, 2020). Penelitian dengan judul Geologi dan Potensi Kerawanan Banjir Bandang Desa Sungai Jernih dan Sekitarnya Provinsi Jambi, dalam penelitian ini juga dijelaskan mengenai pemetaan banjir dan mengidentifikasi daerah mana yang rawan terhadap dampak banjir yang tinggi dan salah satunya adalah Kecamatan yang penulis teliti (Parmelian et al., 2022). Penelitian dengan judul Pengaruh Penyuluhan dengan Media Audiovisual Terhadap Pengetahuan Masyarakat Tentang Penanganan Menghadapi Bencana Banjir di Desa Tanjung Kecamatan Hamparan Rawang Provinsi Jambi, hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa ada pengaruh pemberian penyuluhan dengan media audiovisual kepada masyarakat tentang penanganan banjir di Desa Tanjung Kecamatan Hamparan Rawang (Fernalia et al., 2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Drainase Yang Berkelanjutan Berbasis Partisipasi Masyarakat Kota Sungai Penuh dimana dalam penelitian ini menunjukkan bahwa koefisien hubungan antara variabel aspek fisik terhadap keberlanjutan drainase perkotaan berpengaruh positif dan signifikan (Mulya et al., 2021). Kemudian penelitian yang berjudul *Multi-scale, integrated strategies for urban flood resilience* dimana dalam penelitian ini diharapkan pembuat kebijakan dalam hal ini eksekutif dan legislative dapat bekerja sama untuk memberikan solusi antisipatif sebelum bencana banjir terjadi (Adeyeye & Emmitt, 2017) dapat menjadi kunci pelaksanaan penanggulangan bencana banjir (Ningtyas et al., 2020), serta peran optimal dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi banjir (Ningtyas et al., 2021),

2. Metode

Sebagaimana telah penulis sampaikan pada pembahasan sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan teori yang diungkapkan oleh Ansell & Gash yang terdiri dari 4 indikator yaitu kondisi awal, desain institusional, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi. Untuk indikator kondisi awal item yang penulis nilai terdiri dari kekuatan untuk memberikan arah dan perintah, sumber daya yang terdiri dari manusia dan peralatan, serta sejarah dimasa

lampau dalam hal kerjasama dan atau konflik. Selanjutnya indikator desain institusional partisipasi seluruh elemen lembaga, aturan dasar yang jelas serta transparansi proses. Indikator kepemimpinan fasilitatif terdiri dari keterbukaan pimpinan, keberanian dan menerima nasehat. Sedangkan indikator terakhir yaitu proses kolaborasi yang terdiri dari dialog tatap muka, membangun kepercayaan dan pemahaman bersama.

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode kualitatif (*qualitative research*) (Yuliyanti, 2018), dengan pendekatan deskriptif. Menurut Creswell Pendekatan penelitian dengan metode ini dimulai dengan penafsiran teori, asumsi serta studi tentang permasalahan bagaimana individu atau kelompok memaknai permasalahan tersebut (Romadhan et al., 2023). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan memprioritaskan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi (Cahyadi, 2017). Penggalan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu menggunakan informan dan orang-orang yang dapat memberikan informasi dan mampu memahami serta membantu dalam penelitian (Rahmadani et al., 2022), karena informan merupakan orang yang dianggap mampu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan di wilayah penelitian (Azzunaika & Havidani, 2022). Adapun informan dalam penelitian ini adalah instansi yang terkait langsung dalam penanganan banjir di Kota Sungai Penuh yaitu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Pemukiman, Kodam Kota Sungai Penuh, dan unsur masyarakat. Teknik Analisa data dengan melakukan beberapa tahapan yaitu pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab banjir di Kota Sungai Penuh diantaranya adalah: 1) Meluapnya sungai yang ada di Kota Sungai Penuh, 2) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, 3) Drainase yang kurang memadai, 4) Curah hujan yang tinggi pada setiap tahun, 5) Banyaknya pemukiman dibantaran kali atau sungai (Reski, 2022). Dalam pelaksanaan penanggulangan banjir di Kota Sungai Penuh diperlukan kolaborasi diantara instansi terkait, penulis menganggap ini penting karena sejauh ini untuk penelitian *collaborative governance* belum ditemukan terkhusus untuk Kota Sungai Penuh tersebut. Merujuk pendapat Connick dan Ines, dikatakan bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah perwakilan dari semua kepentingan yang relevan dengan permasalahan yang ditangani (Wicaksono, 2019). Berkaitan dengan hal diatas, berikut penulis paparkan mengenai kolaborasi multi aktor dalam penanggulangan banjir di Kota Sungai Penuh yang terdiri dari aktor internal dan aktor eksternal sebagai berikut:

Tabel 2. Pemetaan Aktor dalam Penanggulangan Banjir Kota Sungai Penuh

No	Aktor	
	Internal	Eksternal
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sungai Penuh	Masyarakat
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Sungai Penuh	Pemuda Peduli Lingkungan
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PURKIM) Kota Sungai Penuh	Tokoh Adat Setempat
4	Kodam/TNI Kota Sungai Penuh	
5	Dinas Sosial	

Sumber: BPBD Kota Sungai Penuh 2022

Dari tabel diatas jelas bahwa banyak aktor yang terlibat dalam penanggulangan banjir di Kota Sungai Penuh dimana semua aktor yang terlibat mempunyai tugas dan masing-masing, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk aktor internal dimotori oleh BPBD Kota Sungai penuh yang berkoordinasi langsung dengan Wali Kota Sungai Penuh dan mempunyai kewenangan lebih dalam penanggulangan banjir yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah dimana pada pasal 29 ayat 2 dijelaskan bahwa dalam keadaan status darurat bencana BPBD mempunyai kemudahan akses untuk: a) pengarahannya sumber daya manusia, b) pengarahannya peralatan, c) pengarahannya logistic, d) pengadaan barang dan jasa, e) pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan atau barang, f) penyelamatan dan g) komando untuk memerintahkan instansi/lembaga. Untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Sungai Penuh melakukan tugas dan tanggung jawab yang salah satunya adalah untuk membangun drainase untuk mengurangi resiko banjir. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PURKIM) Kota Sungai Penuh melakukan tugas dan kewenangannya yang berkaitan dengan penanganan pasca bencana untuk perbaikan. Dinas Sosial Kota Sungai Penuh bertugas memberikan bantuan baik berupa logistik maupun keperluan lain yang dibutuhkan pada saat banjir. Sedangkan dari pihak Kodam/TNI membantu melakukan evakuasi jika memang dibutuhkan. Dan untuk masyarakat sendiri sudah tentu membantu masyarakat lainnya jika bencana banjir ini melanda, baik dari tahap persiapan hingga tahap eksekusi. Namun menurut pengamatan penulis dilapangan, aktor yang berperan sangat dominan adalah BPBD Kota Sungai Penuh dikarenakan instansi ini mempunyai hak dan kewenangan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah. Sedangkan aktor yang tidak berperan sama sekali adalah pihak swasta dalam hal ini perusahaan yang terdapat di Kota Sungai Penuh.

Dalam penelitian ini penulis tidak lupa untuk membahas mengenai indikator penelitian

yang penulis kutip dari Ansell & Gash, dimulai dari indikator pertama yang terdiri dari:

a) Kondisi Awal

Dalam penanganan banjir di Kota Sungai Penuh dalam hal ini tanggung jawab dari Wali Kota Sungai Penuh melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sungai Penuh. Sejauh ini pelaksanaan penanganan banjir dilakukan dengan cara Kerjasama yang dilakukan oleh multi aktor. Berdasarkan wawancara penulis dengan kepala BPBD Kota Sungai Penuh disimpulkan bahwa BPBD Kota Sungai Penuh tidak punya kekuatan penuh dalam rangka untuk memberikan arahan dan perintah kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penanggulangan banjir. BPBD Kota Sungai Penuh hanya mempunyai kekuatan memberikan arahan dan perintah hanya kepada internal BPBD, dan untuk instansi lain hanya sebatas Kerjasama, koordinasi dan komunikasi saja. Berdasarkan hal diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap instansi atau aktor yang terlibat dalam penanggulangan banjir di Kota Sungai Penuh sudah mempunyai tugas dan wewenangnya masing-masing dan dapat memberikan laporan serta pertanggungjawabannya kepada Wali Kota Sungai Penuh.

Sumber daya dalam penanganan banjir ini terdiri dari sumber daya manusia, dan sumberdaya peralatan. Untuk sumber daya manusia dinilai memadai, karena yang terlibat dalam penanganan banjir di Kota Sungai Penuh ini selain instansi terkait sebagaimana telah penulis ungkapkan diatas, juga terdiri dari unsur masyarakat yaitu pemuda yang tergabung dalam pemuda peduli lingkungan dan tokoh adat setempat. Namun untuk peralatan dan perlengkapan penulis menilai belum memenuhi dan hal ini juga senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mandasari tahun 2019 bahwa dalam penanggulangan banjir di Kota Sungai Penuh masih terkendala peralatan yang belum memadai serta sarana dan prasarana belum sepenuhnya ada seperti tenda yang digunakan untuk tempat evakuasi sementara bagi masyarakat pada saat banjir melanda. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala BPBD Kota Sungai Penuh bahwa fasilitas atau sarana prasarana dalam penanggulangan banjir masih kurang terutama pembangunan dreinasi dan tanggul penahan banjir yang dilakukan oleh pihak PUPR Kota sungai penuh. Seperti yang diketahui pembangunan drainase perlu dilakukan dalam upaya penaggulangan banjir (Prasetyo et al., 2019) dan pembangunan tanggul juga merupakan upaya untuk meminimalisir terjadinya banjir (Romadhan et al., 2023). Kemudian fasilitas lainnya seperti tenda pada saat evakuasi warga yang terdampak banjir juga masih kurang jika terjadi banjir besar.

Untuk Kerjasama antara instansi juga terlihat belum maksimal yang salah satunya adalah mengenai Kerjasama antara PUPR Kota Sungai Penuh dengan beberapa Kepala Desa yang ada di Kota Sungai Penuh dimana permasalahan yang terjadi adalah pada saat pembuatan

drainase yang diusulkan oleh Kepala Desa yang desanya yang terdampak banjir, namun pembuatan drainase yang dilakukan oleh PUPR Kota Sungai Penuh yang diawasi oleh BPBD Kota Sungai Penuh belum sesuai harapan karena Drainase yang dibangun belum cukup untuk mengurangi tingkat banjir pada setiap tahunnya. PUPR berdalih bahwa untuk pembangunan drainase tidak bisa dilakukan secara menyeluruh, namun pembangunan tersebut dilakukan bertahap karena keterbatasan anggaran. Sesuai data yang penulis terima, untuk pembangunan dreinasi untuk tahun 2022 lau di fokuskan di Kecamatan Hampanan Rawang dikarenakan Kecamatan ini dampak banjirnya sangat besar. Adapun desa yang dibangun dreinasi hanya 2 desa dari total 13 desa yang ada, dan Panjang drainase total sepanjang 1.847,29 meter dengan biaya sebesar Rp. 880.182.009,00. Tidak bisa dipungkiri bahwa pembangunan drainase tersebut menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial antara satu desa dengan desa lainnya, namun sekali lagi PUPR Kota Sungai Penuh beralasan untuk melakukan pembangunan PUPR mengalami kekurangan anggaran, oleh sebab itu pembangunan drainase dilakukan secara bertahap. Kemudian untuk pembangunan di desa lain baik itu berupa drainase maupun tanggul dapat dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya dengan pola prioritas dalam artian desa mana yang mengalami banjir terparah maka desa tersebut yang akan dibangun drainase dan tanggul. Menurut hemat penulis, pembangunan drainase dan tanggul untuk langkah awal penanggulangan atau pencegahan banjir di Kota Sungai Penuh merupakan langkah yang efektif. Pembangunan drainase dan tanggul harus dilakukan secara hati-hati dan professional agar mampu mengalirkan air hujan, begitu pula pembangunan tanggul harus dirancang dengan baik agar mampu bertahan lama serta. Namun yang tak kalah penting adalah edukasi terhadap masyarakat mengenai pengelolaan sampah dalam artian himbuan kepada masyarkat agar tidak membuang sampah sembarangan.

b) Desain Institusional

Hasil penelitian dari indikator Desain Institusi yang ditinjau dari partisipasi secara inklusif menunjukkan bahwa sejauh ini seluruh instansi serta elemen masyarakat sudah terlibat dalam penanganan banjir di Kota Sungai Penuh. Oleh dikarenakan banjir ini terjadi pada setiap tahunnya, maka penulis menilai kinerja dari masing-masing institusi patut dipertanyakan. Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak BPBD Kota Sungai Penuh penulis menyimpulkan bahwa tidak semua hal bisa dilakukan oleh pihak BPBD untuk memberikan arahan secara menyeluruh kepada instansi yang terlibat, karena dalam penanggulangan banjir ini sifatnya hanya komunikasi dan koordinasi lintas intansi sesuai dengan tugas masing-masing.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari BPS Kota Sungai Penuh dan data hasil penelitian lainnya bahwa banjir dari tiap tahun terus terjadi yang dapat dilihat pada tabel

dibawah ini:

Tabel 3. Kejadian Banjir di Kota Sungai Penuh

No	Tahun	Persentasi Banjir
1	2018	2 kejadian
2	2019	20 kejadian
3	2020	5 kejadian
4	2021	1 kejadian
5	2022	1 kejadian

Sumber: BPS Kota Sungai Penuh dan Jurnal Publikasi 2023.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa setiap instansi yang terlibat dalam penanganan banjir di Kota Sungai Penuh dapat bekerja secara maksimal agar banjir setidaknya dapat dikurangi bahkan dapat diatasi.

Berbicara mengenai banjir di Kota Sungai Penuh dan bagaimana cara menanggulangi banjir yang dilakukan sudah ada standar dan aturan dari masing-masing bagian. Untuk melakukan kinerja dalam menaggulangi banjir tentu ada regulasi sebagai dasar payung hukum yaitu Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja dan Lembaga Teknis Daerah Kota Sungai Penuh dan Perwako Nomor 79 Tahun 2010 tentang Tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh serta Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penggulungan Bencana Daerah. Mengenai regulasi yaitu Perwako Nomor 79 Tahun 2010 dijelaskan bahwa BPBD Kota Sungai Penuh mempunyai fungsi untuk berkoordinasi, komando dan pelaksanaan dalam penanggulangan bencana. Artinya BPBD Kota Sungai Penuh diberikan kewenangan seluas-luasnya oleh Wali Kota Sungai Penuh untuk menanggulangi Banjir. Pada dasarnya BPBD Kota Sungai Penuh dalam rangka untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sudah memiliki standar yaitu berupa kebijakan dan regulasi diatas.

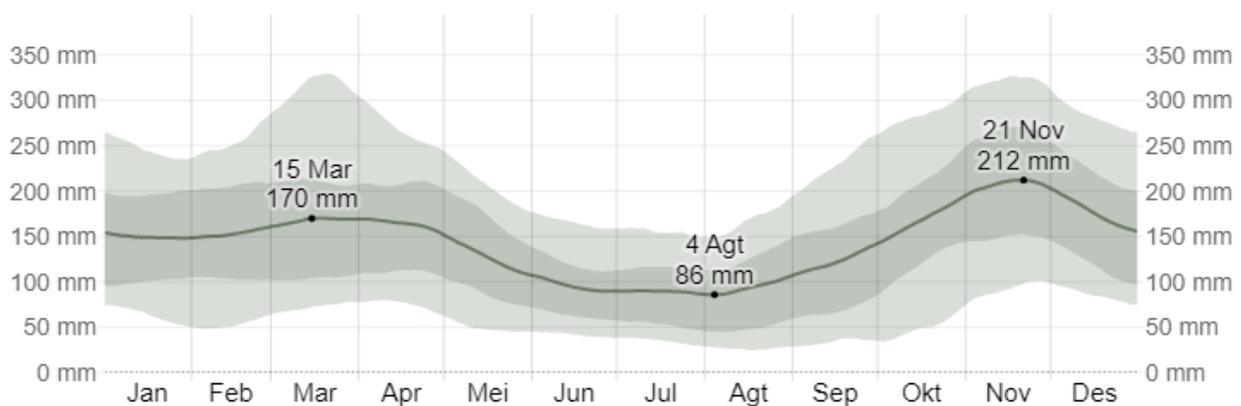
Transaparansi proses dalam menanggulangi banjir di Kota Sungai Penuh ini dilakukan agar banjir dapat diatasi baik pasca banjir maupun setelah banjir, karena transparansi merupakan kegiatan yang terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan (Thetool et al., 2017). Menurut informasi yang penulis terima bahwa transparansi telah dilakukan dengan baik oleh para informan penelitian. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah dengan cara menyampaikan secara transparan kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan pelanggulungan bencana yang akan, sedang dan telah yang dilakukan oleh pihak BPBD. Namun pada kenyataannya masih banyak hal-hal yang ditemui dilapangan yang menyatakan bahwa pelaksanaan dalam menanggulangi banjir belum terkesan transparan yang ditandai dengan kurang puasnya masyarakat dari 3 Kecamatan mengenai pembangunan drainase sebagaimana

yang telah punlis bahas sebelumnya. Oleh sebab itu menurut penulis, dalam menanggulangi banjir di Kota Sungai Penuh mesti dikelola secara transparansi dalam mencegah, mitigasi serta pra bencana maupun pasca bencana.

c) Kepemimpinan Palisitatif

Dalam indikator kepemimpinan fasilitatif ini ada beberapa hal yang penulis nilai diantaranya adalah keterbukaan informasi, keberanian dan menerima nasehat. Keterbukaan dimaksud disini adalah keterbukaan oleh instansi terkait dalam menangani banjir di Kota Sungai Penuh terutama keterbukaan dalam memperoleh ide-ide apa saja yang dibutuhkan dalam penanganan banjir, misalnya ide dari masyarakat yang mesti diakomodir dalam mengantisipasi dan mencegah potensi bencana banjir di Kota Sungai Penuh dibutuhkan peran dan sikap bersama Pemerintah, Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha, dan Masyarakat.

Keterbukaan informasi dalam penanggulangan banjir dalam hal ini adalah BPBD Kota Sungai Penuh telah melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan secara luas yang bertujuan untuk penanganan banjir karena dapat membantu masyarakat memperoleh informasi secara akurat tentang situasi dan kondisi banjir baik pra maupun pasca banjir. Dalam hal ini BPBD Kota Sungai Penuh memberikan informasi yang akurat mengenai lokasi dan tingkat bahaya banjir yang dilakukan pada saat musim penghujan akan tiba karena penyebab banjir di Kota Sungai Penuh adalah luapan air sungai yang disebabkan intensitas curah hujan pada saat musim hujan. Sebagaimana data yang penulis peroleh dari weatherspark.com, curah hujan dikota sungai penuh menunjukkan angka yang bervariasi pada setiap tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2. Rata-rata Curah Hutan di Kota Sungai Penuh

Sumber: weatherspark.com, 2022

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah curah hujan di Kota Sungai Penuh relatif tinggi pada Bulan November yaitu rata-rata sebesar 211 melimeter, dan yang terendah yaitu Bulan Juli dengan rata-rata sebesar 90 melimeter. Dari data diatas maka masyarakat dan

BPBD dapat mengantisipasi bahwasanya banjir kemungkinan besar terjadi disekitaran Bulan November pada setiap tahunnya. Oleh sebab itu masyarakat dan BPBD Kota sungai penuh secara cermat dapat mengantisipasi pada bulan tersebut. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari berbagai sumber baik dari data maupun hasil wawancara bahwa BPBD Kota Sungai Penuh telah melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai banjir tersebut sesuai dengan yang telah penuli jelaskan diatas.

Selain itu intansi atau Lembaga yang menjadi ujung tombak dari penanggulangan bencana ini adalah BPBD Kota Sungai Penuh mesti berani dalam mengambil sikap sebagai instansi yang dianggap mampu untuk menanggulangi banjir. Adapun hal-hal yang dilakukan adalah menjamin keselamatan bagi masyarakat Kota Sungai Penuh. Dalam penanganan banjir ini penting sekali untuk diperhatikan oleh semua pihak yang terlibat karena penanganan ini bukan hanya tanggung jawab dari aktor pemerintah saja, melainkan dari unsur masyarakat itu sendiri beserta sector swasta. Sebagaimana informasi yang penulis peroleh dari berbagai sumber dan wawancara dapat penulis simpulkan bahwa BPBD dalam hal ini telah mengambil sikap dengan cara meningkatkan kesadaran Bersama dengan melakukan edukasi kepada masyarakat, membuat system peringatan dini banjir utamanya dimusim penghujan, membangun infrastruktur (drainase), serta melaksanakan kebijakan yang menekankan pada mitigasi resiko banjir di Kota Sungai Penuh.

Kemudian BPBD Kota Sungai Penuh mampu mengakomodir nasehat ataupun masukan dari masyarakat luas bagaimana idealnya penanganan banjir serta kekurangan dilapangan pada saat penanganan. Dalam mengakomodir nasehat dan masukan dari masyarakat luas perlu dipertimbangkan untuk dijadikan bahan evaluasi bagi BPBD. Berdasarkan informasi dan wawancara dapat penulis simpulkan bahwa BBPD Kota Sungai Penuh mengadakan diskusi atau pertemuan dengan masyarakat dimana masyarakat bebas untuk memberikan masukan atau saran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan banjir.

d) Proses Kolaborasi

Dialog tatap muka merupakan proses penting dalam suatu *collaborative*, karena melalui dialog dengan tatap muka akan menyatukan persepsi terhadap hal yang ingin dicapai bersama. Dalam hal dialog tatap muka yang dilakukan oleh BPBD Kota Sungai Penuh sebagai ujung tombak dalam menanggulangi banjir telah dilakukan secara maksimal, terutama kepada unsur masyarakat yang terkena banjir. Banyak hal-hal yang telah dilakukan terutama persiapan yang dilakukan dalam rangka untuk menanggulangi banjir yang salah satunya adalah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah dimana hal yang dilakukan dalam proses tatap muka adalah

dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana. Dialog juga dilakukan setelah banjir terjadi dengan cara mengevakuasi masyarakat yang terdampak serta memfasilitasi masyarakat apabila masyarakat mengungsi ketempat yang aman, serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam hal membangun kepercayaan telah dilakukan oleh BPBD Kota Sungai Penuh dengan melakukan hal-hal diatas. Artinya dalam penanganan bencana yang terjadi di Kota Sungai Penuh telah didelegasikan oleh Wali Kota Sungai Penuh ke BPBD Kota Sungai Penuh dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. Berdasarkan informasi dan hasil wawancara yang penuli lakukan bahwa salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh BPBD Kota Sungai Penuh adalah setiap saat terjadi banjir maka pihak BPBD Kota Sungai Penuh hadir untuk membantu masyarakat, mengevakuasi, serta mefasilitasi masyarakat yang terkena dampak baik berupa bantuan memeneuhi kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, pemulihan darurat sarana maupun prasarana.

Pemahaman bersama atau pandangan yang sama tentang tujuan yang harus dilaksanakan dalam penanganan banjir telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Pemukiman, Kodam Kota Sungai Penuh, dan unsur masyarakat yang terdiri dari pemuda peduli lingkungan dan tokoh adat setempat. Dalam pemahaman bersama ini diharapkan tidak terjadi konflik antara satu instansi dengan instansi yang lain dalam penanganan banjir seperti tidak satu persepsi antara PUPR Kota Sungai Penuh dengan masyarakat mengenai pembangunan drainase. Oleh sebab itu dalam penanggulangan banjir di Kota Sungai Penuh mesti terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antar aktor agar tidak terjadi kendala-kendala dalam penanggulangan banjir.

4. Simpulan

Penanggulangan bencana di Kota Sungai Penuh belum menunjukkan hasil yang memuaskan karena banjir ini terjadi sudah sejak lama, namun hingga saat ini belum ada penanganan yang benar-benar menunjukkan hasil positif. Penulis juga menilai belum ada kolaborasi yang komprehensif tentang penanganan banjir sebagaimana yang disampaikan oleh Ansel & Gash yang diperkuat dengan indikator penelitian yaitu kondisi awal, desain institusi, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi. Ada beberapa penyebab terjadinya *collaborativ governance* tidak berjalan dengan baik berkaitan dengan penanganan banjir di Kota Sungai Penuh diantaranya adalah belum terciptanya kerjasama yang maksimal antara intansi terkait yang ditunjuk oleh Wali Kota Sungai Penuh dalam penanggulangan banjir. Namun demikian,

penulis melihat kinerja dari BPBD Kota Sungai Penuh dalam penanggulangan banjir patut di apresiasi karna intansi ini merupakan garda terdepan dalam penanggulangan banjir, walaupun tidak terjalin kerjasama yang baik dengan intansi lain.

Kedepan diharapkan badan BPBD Kota Sungai Penuh dapat bekerjasama secara maksimal kepada intansi yang ditunjuk untuk berama-sama dan bahu-membahu didalam penanggulangan banjir. Sosialisasi dan simulasi banjir juga terus dimaksimalkan lebih-lebih pada saat musim penghujan agar masyarakat dapat mempersiapkan diri sejak dini jika sewaktu-waktu bencana banjir melanda.

5. Referensi

- Adeyeye, K., & Emmitt, S. (2017). Multi-scale, integrated strategies for urban flood resilience. *International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment*, 8(5), 494–520. <https://doi.org/10.1108/IJDRBE-11-2016-0044>
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55–67. <https://doi.org/10.26661/2522-1566/2021-3/17-05>
- Arfani, M. (2022). Kolaborasi Pentahelix dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana pada Destinasi Wisata Di Desa Kalanganyar Sidoarjo. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(1), 104–120. <https://doi.org/10.46799/jurnalsyntaxtransformation.v3i1.497>
- Arifin, R. W. (2016). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Indonesia Berbasis Web. *Bina Insani Ict Journal*, 3(1), 1–6.
- Astuti, R., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). Sampul Collaborative Governance. In *Universitas Diponegoro Press*.
- Azzunaika, R. G., & Havidani, A. (2022). Strategi Pelayanan Publik Polres Cilegon Sebagai Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. *Jpap*, 8(2), 224–238.
- Cahyadi, A. (2017). PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis Good Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(2). <https://doi.org/10.30996/jpap.v3i2.1255>
- Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 200. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2188>
- Faiza, I. M., Gunawan, G., & Andriani, W. (2022). Tinjauan Pustaka Sistematis: Penerapan Metode Machine Learning untuk Deteksi Bencana Banjir. *Jurnal Minfo Polgan*, 11(2), 59–63. <https://doi.org/10.33395/jmp.v11i2.11657>
- Fernalia, F., Wahyuni, S., & Hanifah, H. (2021). Pengaruh Penyuluhan Dengan Media Audiovisual Terhadap Pengetahuan Masyarakat Tentang Penanganan Menghadapi Bencana Banjir Di Desa Tanjung Kecamatan Hampanan Rawang Provinsi Jambi. *Malahayati Nursing Journal*,

3(4), 587–599. <https://doi.org/10.33024/mnj.v3i4.5257>

- Hariyoko, Y. (2022). Kajian Literatur Sistematis Pembangunan Desa Berkelanjutan: Analisis Pada Basis Data Scopus Penelitian Tahun 2018 Sampai 2021. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 17(2), 209–218. <https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.264>
- Ipan, Purnamasari, H., & Priyanti, E. (2021). Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting. *Kinerja*, 18(3), 383–391.
- Machruf, I. N., Hermawan, D., & Meutia, I. F. (2020). Penanggulangan Pra Bencana Alam Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif Collaborative Governance. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2(1), 129–146. <https://doi.org/10.23960/administrativa.v2i1.25>
- Mandasari, N. (2020). Penanggulangan Bencana Banjir Di Sungai Batang Merao Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh. *Jurnal Administrasi Nusantara*, 3(2), 43–51. <https://doi.org/10.51279/jan.v3i2.344>
- Mizwar Zuherna, Wardi, W. B. (2021). *ANALISIS PENGELOLAAN PEMELIHARAAN SANITASI BERBASIS P[ARTISIPASI MASYARAKAT (STUDI KASUS : KOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI)*.
- Muhammad, F. I., & Aziz, Y. M. A. (2020). Implementasi Kebijakan Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Desa Dayeuhkolot. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(1), 52–61. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i1.2235>
- Mulya, Aswandi, & Sunarti. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Drainase Yang Berkelanjutan Berbasis Partisipasi Masyarakat (Study Kasus Kawasan Jl Pancasila Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh). *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 4(2), 17–23.
- Musfida, A., Manaf, M., Tantu, A. G., Hadijah, H., Syafri, S., & Kastono, K. (2021). Kajian Lokasi Rawan Bencana Banjir Pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Walanae Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 21(2), 348–357. <https://doi.org/10.35965/eco.v21i2.1111>
- Mutiarawatai, T., & Sudarmo. (2021). Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Publik, Jurnal Wacana*, 1(1), 82–98.
- Neise, T., & Diez, J. R. (2018). Firms' contribution to flood risk reduction-scenario-based experiments from Jakarta and Semarang, Indonesia. *Procedia Engineering*, 212(February), 567–574. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2018.01.073>
- Ningtyas, T., Larasati, E., Warsono, H., & Purnaweni, H. (2020). *Multi-stakeholder Participation Challenges In Local Disaster Management Policies: A Case from Bojonegoro District, Indonesia*. 510(Icosaps), 417–424. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201219.063>
- Ningtyas, T., Larasati, E., Warsono, H., & Purnaweni, H. (2021). Optimization of Destana policies (Resilience Disaster Village) to improve community preparedness for flood disaster in Bojonegoro District, Indonesia. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 1(15), 113–126. <https://doi.org/10.26661/2522-1566/2021-1/15-08>
- Parmelian, V., Siregar, A. D., & Said, Y. M. (2022). Geology and Potential Flash Flood Vulnerability

of Sungai Jernih Village and Surroundings, Pondok Tinggi District, Kerinci Regency, Jambi. *Jurnal Geocelebes*, 6(1), 24–36. <https://doi.org/10.20956/geocelebes.v6i1.14824>

- Prasetyo, R. D., Cahyo, Y., & Ridwan, A. (2019). Analisa Perencanaan Sistem Drainase Dalam Upaya Penanggulangan Banjir Di Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Manajemen Teknologi & Teknik Sipil*, 2(1), 131. <https://doi.org/10.30737/jurmateks.v2i1.405>
- Qur, M. (2021). *Collaborative Governance pada Revitalisasi Sungai Sekanak di Kota Palembang*. 6(3), 107–114.
- Rahmadani, R. I., Mursyidah, L., Hariyoko, Y., & Sidoarjo, U. M. (2022). *Peran Penyedia Barang Langsung Dan Jasa oleh Dinas Pangan dan Pertanian Dalam Meningkatkan Produksi Padi di Kabupaten Sidoarjo The Role of Direct Goods and Service Providers by the Food and Agriculture Office in Increasing Rice Production in Sidoarjo Rege*. 8(2), 211–223.
- Reski, D. (2022). Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mengatasi Bencana Banjir Di Kecamatan Hampanan Rawang Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. *Repository UIR*, 8.5.2017, 2003–2005.
- Romadhan, A. A., Fakhri, A. R., & Sihidi, I. T. (2023). Implementasi Kebijakan Pengendalian Banjir di kawasan Sempadan Sungai Kali Lamong Kabupaten Gresik. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik Untag Surabaya*, 8(2), 263–278.
- Rosida, F., & Adi, K. R. (2017). Studi Eksplorasi Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Banjir Di SD Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Teori Dan Praksis Pembelajaran IPS*, 2(1), 1–5. <https://doi.org/10.17977/um022v2i12017p001>
- Setiawan, B. A. P., Yulyana, E., & Aryani, L. (2021). Collaborative Governance dalam Penanganan Banjir di Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* [Htts://jurnal.unibrah.ac.id/index.php/JIWP](https://jurnal.unibrah.ac.id/index.php/JIWP), 7(1), 168–175. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5746176>
- Setyowati, D. L. (2019). Pendidikan Kebencanaan. *Urgensi Pendidikan Mitigasi Bencana*, 1–14.
- Sihaloho, N. T. P. (2022). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 6(1), 161. <https://doi.org/10.31604/jim.v6i1.2022.161-174>
- Tando, C. E., Sudarmo, S., & Haryanti, R. H. (2019). Pemerintahan Kolaboratif Sebagai Solusi Kasus Deforestasi di Pulau Kalimantan: Kajian Literatur. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(3), 257–274. <https://doi.org/10.24258/jba.v15i3.516>
- Thetool, Y., Indartuti, E., & Soenarjanto, B. (2017). PELAYANAN PUBLIK BERBASIS GOOD GOVERNANCE (Studi tentang Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan KTP di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(1), 668–674. <https://doi.org/10.30996/jpap.v3i1.1237>
- Umabahi, H. I., Nurdin, N., & Arsyad, R. (2022). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Kepulauan Sula. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 1349–1358.
- Wicaksono, A. (2019). Kolaborasi Multi Aktor dalam Program Restorasi Gambut di Provinsi

Riau. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 99–113.
<https://doi.org/10.25077/jakp.4.2.111-125.2019>

Yetty, S., Edial, H., & . T. (2018). Pemetaan Wilayah Bahaya Banjir Di Kota Sungai Penuh. *Jurnal Buana*, 2(5), 383. <https://doi.org/10.24036/student.v2i5.239>

Yuliyanti, T. (2018). Penguatan Institusi Lokal dan Menggerakkan Modal Sosial Melalui Komunitas Untuk Menciptakan Kampung Berdaya. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(1), 1004–1010. <https://doi.org/10.30996/jpap.v4i1.1285>

Zubaidi, A. (2018). Paradigma Konstruktivisme-Progresif Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Majelis*, 04, 81–97.